

ADMINISTRASI BONGKAR MUAT BARANG
DI PELABUHAN MAKASSAR



UNIVERSITAS
Oleh

MUH. YUSUF DG. SIKKI Z.

4594 021 059

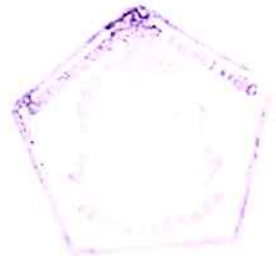
BOGOWA

*Skripsi sebagai salah satu syarat
untuk menempuh ujian Sarjana Negara
Jurusan Ilmu administrasi*

Pada

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG

1999



HALAMAN PENGESAHAN

Hari ini Sabtu, tanggal Enam Belas Bulan Januari Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan, Skripsi dengan judul "ADMINISTRASI BONGKAR MUAT BARANG DI PELABUHAN MAKASSAR".

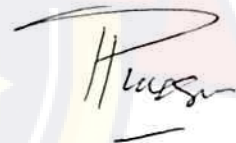
Nama : MUH. YUSUF DG SIKKI Z.
No. Stb/Nirm : 4594021059/9941110510074.
Jurusan : Ilmu Administrasi.
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara.

Mengetahui,

Pembimbing I

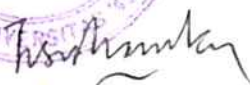


Pembimbing II



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45"
Ljung Pandang.



Ketua Jurusan : Ilmu Administrasi Negara.



HALAMAN PENERIMAAN

ini Sabtu tanggal, Enam Belas Bulan Januari Tahun Seribu Sembilan
us Sembilan Puluh Sembilan.

Nama : MUH. YUSUF DG SIKKI Z.
No. Stb/ Nimm : 4594021059/9941110510074.
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Pengawas Umum,

UNIVERSITAS

BOSOWA

Panitia Penguji,

Handwritten signature

Muhammad Ridwan, Ms.
Ketua

Handwritten signature
Sekretaris

Tim Penguji :

rs. H. Misbahuddin Ahmad, Ms.
rs. Ridwan Iskandar.
rs. H. Baharuddin, Ms.
rs. M. Natsir Tompo.

Ketua (.....)
Anggota (.....)
Anggota (.....)
Anggota (.....)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, penulis panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang.

Penulis sadar, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa maupun materinya. Maka demi kesempurnaan skripsi ini maupun sebagai bekal di masa mendatang, dengan senang hati penulis menerima segala kritikan dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak.

Demikian pula, tanpa bantuan dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak mungkin penulis dapat merampungkan skripsi ini. Oleh karena itu, sudah sepatutnya pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak. Khususnya kepada Bapak Drs. H. Misbahuddin Ahmad, MS., dan Bapak Drs. M. Natsir Tompo, masing-masing selaku pembimbing I dan II, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis demi kesempurnaan skripsi ini.

Selanjutnya penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Andi Jaya Sose, SE.MBA., selaku Rektor Universitas "45" Ujung Pandang.
2. Bapak Drs. Husain Hamka, MS., selaku Dekan Fisipol Universitas "45" Ujung Pandang.
3. Ibu Dra. Juhanni, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang.
4. Bapak Kolonel (Laut) Suyono Dipo, SE., selaku Administrator Pelabuhan Makassar, segenap staff dan karyawan yang telah bersedia memberikan keterangan atau informasi bagi penulis dalam pengumpulan data penelitian.
5. Seluruh Dosen dan Staf Universitas "45" Ujung Pandang yang telah banyak memberikan bantuannya kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.
6. Kedua orang tua penulis, yang telah bersusah payah membesarkan dengan penuh belaian kasih sayang mengasuh, mendidik dan membimbing serta iringan do'anya sejak kecil sampai sekarang.
7. Rekan-rekan penulis terutama yang seangkatan yang selalu bersama-sama dalam kuliah maupun dalam penyelesaian studi.

Penulis yakin, semua bantuan Bapak, Ibu dan rekan-rekan akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Akhirnya skripsi yang sederhana ini, penulis persembahkan kepada segenap pembaca yang budiman, semoga ada manfaatnya.

Ujung Pandang, Oktober 1998

Penulis,



LAMAN JUDUL	1
LAMAN PENGESAHAN	ii
LAMAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
ABSTRAK	9
B I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
D. Kerangka Konseptual	4
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Pembahasan	7
B II. TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian Administrasi	9
B. Fungsi-Fungsi Administrasi	11
C. Komunikasi dan Koordinasi	17
D. Bongkar Muat	20
B III. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	22
A. Sejarah Singkat Pelabuhan Makassar	22
B. Struktur Organisasi	26
C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	28
D. Keadaan Pegawai	29
B IV. HASIL PENGUMPULAN DATA DAN PEMBAHASAN	32
A. Pelaksanaan Bongkar Muat di Pelabuhan Makassar ..	32
B. Pengawasan Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut dan - Bongkar Muat Barang	39
B V. P E N U T U P	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran-Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	55
LEMBIRAN	57

DAFTAR TABEL

No.Urut	No.Tabel	Nama Tabel	Halaman
1.	1.	Realisasi Kunjungan Kapal Menurut Jenis Pelayaran. Tahun 1993 Sampai 1997	25
2.	2.	Keadaan Pegawai Pada Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut Pelabuhan Makassar Berdasarkan Golongan dan Bidang Tugas, Keadaan Tahun 1998.	29
3.	3.	Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Kantor Bidang Lalu Linatas Angkutan Laut Pelabuhan Makassar, Keadaan Tahun 1998	30
4.	4.	Keadaan Komunikasi Antar Pegawai Dalam Pelaksanaan Tugas	33
5.	5.	Keadaan Koordinasi Secara Vertikal Dalam Pelaksanaan Tugas	34
6.	6.	Keadaan Koordinasi Secara Horizontal Dalam Pelaksanaan Tugas ..	35
7.	7.	Kemampuan Pegawai Dalam Melaksanakan Tugas	36
8.	8.	Perencanaan Kerja Setiap Memulai Tugas dan Tanggung Jawab yang Di berikan	37
9.	9.	Pelaksanaan Tugas Pegawai Berdasarkan Perencanaan Kerja yang Telah Dibuat.....	38
10.	10.	Penerapan Sistem Pengawasan Dalam Pelaksanaan Aktivitas Sehari-hari	39
11.	11.	Pemberian Arahan Dari Pimpinan Setiap Saat Demi Kelancaran Pelaksanaan Tugas.....	40
12.	12.	Tanggapan Responden Sehubungan Dengan Pengawasan Dalam Pelaksanaan Tugas	41

13.	13.	Tanggapan Responden Tentang Kontinuitas Pelaksanaan Pengawasan .	43
14.	14.	Pernyataan Responden Tentang Keharusan Memberikan Laporan Tentang Setiap Tugas dan Tanggung Jawab yang Dibebankan	44
15.	15.	Pemeriksaan Atas Segala Tugas dan Tanggung Jawab yang Diberikan ...	45
16.	16.	Tanggapan Responden Tentang Obyektivitas Pengawasan oleh Pimpinan	46
17.	17.	Tanggapan Responden Mengenai Dampak Pengawasan Dalam Mengantisipasi Kesalahan atau Penyelewengan Dalam Pelaksanaan Tugas	47
18.	18.	Tanggapan Responden Mengenai Adanya Sanksi/Hukuman Bagi Pegawai yang Melakukan Pelanggaran	48
19.	19.	Penekanan oleh Pimpinan untuk Melaksanakan Tugas dengan Penuh Rasa Tanggung Jawab	49

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan arus lalu lintas atau pemanfaatan pelabuhan Makassar, maka kegiatan pelayanan harus lebih ditingkatkan, dan hal tersebut merupakan tanggung jawab dari pada Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut. Dalam upaya memperlancar pelaksanaan tugas Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut, maka diperlukan administrasi yang baik, baik ditinjau dari aspek kerjasama maupun aspek pengawasan dalam pelaksanaan tugas para pegawai.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah; bagaimana keadaan kerjasama dalam pelaksanaan bongkar muat barang, bagaimana pengawasan Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut dalam menunjang kelancaran arus bongkar muat barang, dan hambatan apakah yang dihadapi serta bagaimana upaya pemecahaannya dalam pelaksanaan bongkar muat barang di pelabuhan Makassar.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap keadaan kerjasama dalam pelaksanaan bongkar muat barang, pengawasan Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut dalam menunjang kelancaran arus bongkar muat barang, dan hambatan yang dihadapi serta upaya pemecahaannya dalam pelaksanaan bongkar muat barang di pelabuhan Makassar.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan administrasi

bongkar muat barang di pelabuhan Makassar. Populasi penelitian ini sebanyak 28 dan merupakan penelitian populasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis persentase.

Adapun hasil temuan-temuan yang diperoleh yaitu:

1. Administrasi bongkar muat barang di pelabuhan Makassar sudah berlangsung dengan baik, ditinjau dari aspek kerjasama yang ditunjang oleh komunikasi secara harmonis, koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkup Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut pelabuhan Makassar. Begitu pula aspek pengawasan sudah diterapkan dengan baik serta mendapat respon secara positif dari para pegawai, sehingga para pegawai dapat melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi.
2. Faktor pendukung administrasi bongkar muat barang di pelabuhan Makassar, yaitu; rasa tanggung jawab pegawai untuk melaksanakan tugas berkat adanya pendelegasian tugas secara jelas, faktor kerjasama yang dilandasi oleh komunikasi yang harmonis serta koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga memperlancar pelaksanaan tugas para pegawai, dan adanya perhatian yang cukup besar dari atasan dengan mengadakan pengawasan setiap saat sehingga pelaksanaan tugas para pegawai khususnya yang bersifat adminis-

tratif guna memperlancar bongkar muat barang di pelabuhan Makassar semakin efektif dan efisien.

3. Kendala dan upaya pemecahannya dalam administrasi bongkar muat barang di pelabuhan Makassar meliputi; keterbatasan Faktor kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki baik ditinjau dari segi kualitas maupun kuantitas yang disebabkan oleh latar belakang pendidikan pegawai, serta aspek ketidakterbukaan pegawai terhadap berbagai permasalahan yang dialami. Adapun upaya yang dilakukan adalah memberikan kesempatan kepada para pegawai untuk mengikuti pendidikan formal serta pendidikan pelatihan. Di samping itu, berupaya meningkatkan komunikasi secara harmonis antar pegawai, sehingga terjalin kerjasama atau koordinasi dengan penuh rasa kekeluargaan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam aktivitas sehari-hari seseorang tidak pernah lepas dari orang lain begitu pula halnya setiap unit kerja harus selalu menjalin kerjasama dengan unit kerja lain dalam meningkatkan produktivitas kerja pegawai. Hal tersebut juga berlaku pada Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut Administrator Pelabuhan dalam menunjang kelancaran arus bongkar muat barang sebagai suatu upaya meningkatkan pelayanan.

Seiring dengan perkembangan arus lintas atau pemanfaatan pelabuhan Makassar, maka kegiatan pelayanan harus lebih ditingkatkan, mengingat yang memanfaatkan jasa pelabuhan Makassar semakin meningkat dari tahun ke tahun, dan hal tersebut merupakan salah satu tanggung jawab dari pada Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut Administrasi Pelabuhan Makassar.

Namun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut Administrator Pelabuhan Makassar dalam menunjang kelancaran arus bongkar muat barang, tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor; seperti keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki, faktor sarana

dan prasarana, faktor komunikasi dan koordinasi, dan berbagai faktor lainnya. Mengenai hal tersebut dipertegas oleh H. Manullang (1992:193) bahwa "keberhasilan suatu organisasi baik besar maupun kecil bukan semata-mata ditentukan oleh sumber daya alam yang tersedia, akan tetapi banyak ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang berperan merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan organisasi yang bersangkutan".

Ada berbagai permasalahan yang dihadapi Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut Pelabuhan Makassar, selama ini terus dipayungi berbagai pemertahan guna menunjang kelancaran arus bongkar muat barang. Karena faktor kelancaran arus bongkar muat barang tidak terlepas dari berbagai indikator seperti kualitas sumber daya manusia, faktor sarana dan prasarana, komunikasi dan koordinasi, dan sebagainya. Oleh karena itu, pihak Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut harus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas.

Selain itu dengan adanya di atas, maka kegiatan kerjasama Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut Pelabuhan Makassar sangat penting dalam menunjang kelancaran arus bongkar muat barang, dan sehubungan dengan hal tersebut pulalah, maka penulis merasa termotivasi untuk mengkaji lewat suatu kajian ilmiah tentang administrasi bongkar

muat barang di pelabuhan Makassar sebagai suatu kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Dalam mengefektifkan area bongkar muat barang di Pelabuhan Makassar sangat dibutuhkan profesionalisme para pegawai dalam melaksanakan kerja, tidak terkecuali Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut. Oleh karena itu, peran unit kerja tersebut sangat menentukan dengan meningkatkan kerja sama dengan berbagai unit kerja lainnya. Sehubungan hal tersebut penulis, maka penulis mengangkat tiga permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bongkar muat barang di pelabuhan Makassar?
2. Bagaimana pengawasan Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut dalam menunjang kelancaran arus bongkar muat barang di pelabuhan Makassar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui keadaan kerjasama dalam pelaksanaan bongkar muat barang di pelabuhan Makassar?
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan bongkar muat barang di pelabuhan Makassar.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai masukan atau input bagi pihak yang berkompetensi sehubungan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, untuk mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu dalam rangka meningkatkan kemampuan etos kerja dalam upaya menunjang kelancaran arus bongkar muat barang di Pelabuhan Makassar.
- b. Bagi penulis, sebagai bahan banding antara teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan.
- c. Sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi penulis pada Fakultas Ilmu, Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang.

D. Kerangka Konseptual

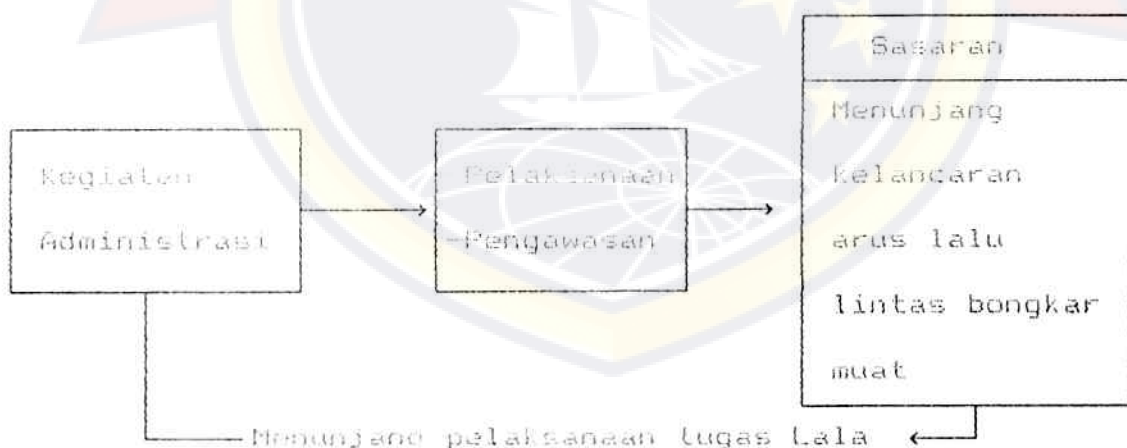
Kebudayaan Pelabuhan Makassar yang didukung oleh berbagai unit kerja yang ada di dalamnya yaitu Kantor Administrator Pelabuhan Makassar khususnya Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut memegang peranan yang sangat besar dalam menunjang arus bongkar muat barang di pelabuhan Makassar.

Dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan tugas Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut, maka sangat diperlukan adanya kegiatan kerjasama antara pegawai baik dalam

lingkup Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut maupun dengan unit kerja lainnya. Karena patut disadari bahwa tanpa adanya kerjasama tersebut, mestilah Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut dapat menjalankan perannya secara optimal.

Dengan demikian, faktor administrasi sangat menentukan kelancaran arus bongkar muat barang pada Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut seperti dari faktor; pelaksanaan, faktor pengawasan dalam menunjang kelancaran arus bongkar muat barang di pelabuhan Makassar. Karena ketiga fungsi tersebut merupakan faktor penentu demi keberhasilan suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya, seperti halnya pada Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut di Pelabuhan Makassar.

Untuk jelasnya mengenai peranan tersebut dapat dilihat pada skema berikut:



E. Metode Penelitian

Dalam usaha memperoleh sejumlah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan fenomena yang berkembang pada obyek penelitian sehubungan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

2. Dasar Penelitian

Dasar penelitian yang digunakan adalah survei, yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari sejumlah informan atau responden melalui angket dan wawancara dengan pihak yang berkompeten.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang pertama dilakukan dalam mengamati permasalahan yang terjadi, begitu pula sebagai pelengkap terhadap teknik pengumpulan data lainnya.

b. Wawancara

Teknik wawancara dimaksudkan untuk mengadakan tatap muka secara langsung kepada sejumlah informasi yang

dipandang sangat berkompeten dalam memberikan informasi sehubungan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

c. Kuesioner (angket)

Angket merupakan instrumen pengumpul data utama dengan membuat daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden yang menjadi sampel penelitian.

4. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah pegawai pada Bidang Lalu Lintas sebanyak 28 orang pegawai. Dengan pertimbangan bahwa jumlah populasi dapat dijangkau, maka tidak diadakan penarikan sampel (penelitian populasi).

5. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam menganalisis data yang diperoleh dari lapangan yaitu analisis deskriptif kualitatif dengan mempergunakan tabel frekuensi dan persentase yang didukung oleh hasil wawancara.

F. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi yang direncanakan tersusun secara sistematis dan dapat diketahui secara cepat dan tepat mengenai isi pokoknya, maka dibuat sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab 1. Pendahuluan yang memuat: latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan

penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II. Tinjauan pustaka yang memuat; pengertian administrasi, fungsi-fungsi administrasi, komunikasi dan koordinasi, dan bongkar muat.

Bab III. Gambaran umum lokasi penelitian yang memuat; sejarah singkat pelabuhan Makassar, struktur organisasi pelabuhan Makassar, dan keadaan pegawai.

Bab IV. Hasil dan pembahasan yang memuat hasil kajian empirik tentang administrasi bongkar muat di pelabuhan makassar, kendala dan upaya pemecahannya.

Bab V. Penutup yang memuat; kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran sebagai bagi pihak yang berkompeten.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Administrasi

Sebelum menguraikan pengertian administrasi terlebih dahulu dikemukakan arti administrasi secara etimologis, yang berasal dari perkataan bahasa Inggris "Administration" dari kata kerja "administer" dimana kata inipun berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata yaitu ad + ministrare yang artinya melayani, membantu, memenuhi atas pemberian jasa.

Dari perkataan di atas, terjadilah kata benda "administratio" dan kata sifat "Administrativus" yang kemudian masuk ke dalam bahasa Inggris menjadi "Administration" yang selanjutnya di Indonesiakan menjadi "Administrasi".

Dalam percakapan masyarakat sehari-hari masih sering di simpang siurkan dengan istilah "Administratic" dari perkataan bahasa Belanda yang artinya "ketatausahaan", yang merupakan pengertian administrasi dalam arti sempit yang meliputi pekerjaan tata usaha yang bersifat mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam suatu usaha (organisasi) yang menjadi bahan keterangan bagi pimpinannya. Sedangkan pengertian administrasi dalam arti luas merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan suatu usaha kerja sama.

Mengingat pembahasan penelitian ini menyangkut administrasi dalam arti luas, maka yang dibahas hanya pengertian administrasi dalam arti luas saja. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai pengertian administrasi dalam arti luas, dikemukakan beberapa rumusan atau batasan.

Menurut The Liang Gie (1978:9) bahwa "Administrasi adalah segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan".

Sedangkan Dwight Waldo (1979:24) mengemukakan pengertian administrasi adalah "Suatu bentuk daya upaya manusia yang kooperatif, yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi".

Kemudian S.P. Siagian (1979:3) mengemukakan bahwa:

Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dengan memperhatikan perumusan administrasi yang dikemukakan di atas, maka rangkaian kegiatan yang digolongkan sebagai administrasi mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Dilakukan oleh sekelompok orang (2 orang atau lebih)
- b. Berlangsung dalam suatu kerjasama
- c. Dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan.

Ketiga faktor inilah yang merupakan tanda pengenal atau ciri khas dari administrasi yang apabila faktor-faktor tersebut disingkat adalah; sekelompok orang, kerjasama, dan tujuan tertentu.

Pengertian tersebut di atas tersirat bahwa dalam administrasi terdapat rencana dan target yang akan dicapai. Jadi pada dasarnya administrasi mencakup segala aspek kegiatan mulai dari merencanakan, melaksanakan sampai kepada pencapaian tujuan.

Dari ketiga faktor tersebut jalin menjalin sehingga menimbulkan suatu proses dalam suatu organisasi berupa rangkaian kegiatan manusia yang bekerja sama secara teratur guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

B. Fungsi-fungsi Administrasi

Administrasi sebagai kegiatan kerjasama sekelompok orang guna mencapai tujuan tertentu. Dari kegiatan kerjasama tersebut, maka terdapat fungsi-fungsi administrasi yang harus dilakukan agar pelaksanaan aktivitas tugas sehari-hari dapat berjalan dengan lancar.

Fungsi-fungsi administrasi yang dimaksudkan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Ketiga faktor tersebut merupakan kunci keberhasilan organisasi dalam memperlancar aktivitasnya.

Perencanaan sebagai langkah awal suatu kegiatan mutlak dilakukan, karena didalam perencanaan telah ter-

cermin mengenai langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu perencanaan harus rasional dan bersifat ke depan.

Selain faktor perencanaan, faktor pelaksanaan merupakan tindak lanjut dari adanya perencanaan, dan dalam pelaksanaan aktivitas hendaknya berdasarkan rambu-rambu yang telah dibuat (perencanaan). Agar pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana, maka hendaknya berbagai faktor yang perlu diperhatikan antara lain; faktor pemberian wewenang berdasarkan tugas dan tanggung jawab, faktor keahlian/kemampuan, dan sebagainya. Selanjutnya agar terjadi keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan, maka diperlukan adanya pengawasan. Namun demikian hendaknya pengawasan bukan untuk mencari-cari masalah tapi untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan. Oleh karena itu, pengawasan harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan demi optimalnya pelaksanaan tugas.

Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah "awas", sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja, dalam arti melihat sesuatu dengan seksama. Tidak ada kegiatan lain di luar itu, kecuali melaporkan hasil kegiatan mengawasi tadi. Sedangkan istilah mengawasi dalam bahasa Inggris disebut controlling yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah controlling lebih luas

artinya daripada pengawasan. Akan tetapi dikalangan ahli atau sarjana telah disamakan pengertian controlling ini dengan pengawasan. Jadi pengawasan termasuk pengendalian.

Untuk menyamakan persepsi kita tentang pengertian pengawasan, maka berikut ini dikemukakan pengertian pengawasan oleh beberapa sarjana atau pakar.

Menurut Sarwoto dalam kutipan Situmorang (1994:18) bahwa "Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki".

Sedangkan menurut rumusan LAN RI (1994:146), pengawasan adalah, "pengawasan yang dilakukan oleh setiap pimpinan terhadap bawahan dan satuan kerja yang dipimpinnya".

Dengan demikian, pengawasan pada hakekatnya merupakan suatu komponen penentu yang harus dilaksanakan dalam rangka mengantisipasi terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, kelalaian yang dianggap berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Pada hakekatnya pengawasan berada di semua tempat kegiatan dan di semua segi penyelenggaraan manajemen. Oleh karena itu, fungsi pengawasan merupakan hal yang sangat esensial demi terciptanya suatu etos kerja yang profesional dalam suatu organisasi.

Agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dapat berhasil guna dan berdaya guna, maka sangat diperlukan adanya fungsi pengawasan yang baik, sebagaimana dikemukakan oleh Juliatriarsa dan Suprihanto (1988: 102), fungsi-fungsi pengawasan adalah:

1. Mencegah terjadinya berbagai penyimpangan atau kesalahan-kesalahan.
2. Untuk memperbaiki berbagai penyimpangan atau kesalahan yang terjadi.
3. Untuk mendinamisir organisasi/perusahaan serta segenap kegiatan manajemen lainnya.
4. Untuk mempertebal rasa tanggung jawab.

Dengan demikian, fungsi pengawasan dalam suatu organisasi lebih berorientasi pada empat aspek, yaitu pencegahan terjadinya penyimpangan atau kesalahan, perbaikan, mendinamisir, serta mempertebal rasa tanggung jawab para pegawai dalam organisasi, baik pemerintahan maupun swasta.

Mencegah terjadinya berbagai penyimpangan atau kesalahan, berarti pengawasan yang baik adalah suatu pengawasan yang dapat mencegah kemungkinan para pegawai melakukan berbagai bentuk penyimpangan, kesalahan ataupun penyelewengan dalam aktivitas kerjanya. Di samping itu, diharapkan agar dapat memperbaiki berbagai penyimpangan atau kesalahan yang terjadi dalam aktivitas kerja pegawai yang bersangkutan.

Untuk mencegah terjadi penyelewengan, maka diperlukan pengaturan yang baik terhadap berbagai aktivitas

pegawai serta berupaya mempertebal rasa tanggung jawab atas tugas yang diberikan.

Oleh karena itu, agar efektifnya suatu fungsi pengawasan, maka ada tiga tipe pengawasan sebagaimana dikemukakan oleh Winardi (1989:418) yaitu "pengawasan pendahuluan, pengawasan pada saat pekerjaan berlangsung dan pengawasan feedback".

Pengawasan merupakan pengawasan awal yang dilakukan oleh pimpinan sebelum pekerjaan dilaksanakan untuk mencegah timbulnya deviasi-deviasi pada kualitas serta kuantitas sumber daya yang digunakan pada organisasi yang bersangkutan. Pengawasan ini merupakan pengawasan preventif.

Pengawasan pada saat pekerjaan berlangsung yaitu memonitor pekerjaan yang berlangsung dapat berbentuk; inspeksi langsung, observasi di tempat, dan laporan di tempat guna memastikan bahwa sasaran dicapai dengan baik. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan bertujuan untuk mengetahui sampai dimana rencana itu dilaksanakan dan bagaimana pelaksanaan pekerjaan tersebut apakah mengalami kemajuan atau tidak. Dengan kata lain, pengawasan bersifat repressif terhadap yang sudah terjadi dan sekaligus bersifat preventif untuk mencegah berkembangnya atau berulangnya kesalahan pada tahap berikutnya.

Koordinasi yang dilakukan baik secara vertikal maupun secara horizontal. Koordinasi secara vertikal yang

dilakukan oleh atasan kepada para bawahannya diharapkan agar kegiatan dalam unit kerja yang bersangkutan dapat tercapai dengan efisien. Contohnya, Kepala Biro mengkoordinasikan kegiatan para Kepala Bagian yang berada di bawah bironya. Sedangkan koordinasi horizontal merupakan koordinasi yang dilakukan dalam unit-unit yang sederajat atau antar instansi yang sederajat.

Agar suatu koordinasi dapat berlangsung secara efektif, maka menurut Ibnu Syamsi (1983:116), ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Adanya pembagian tugas dan pekerjaan yang jelas dalam organisasi.
2. Adanya suasana persaudaraan dan semangat kerja sama yang besar dalam organisasi.
3. Adanya kontak-kontak dan komunikasi yang cukup diantara orang-orang dalam organisasi, dan
4. Koordinasi ditetapkan dan dilaksanakan sebagai kesatuan dengan perencanaan, pembimbingan dan pengendalian.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan tugas sangat diperlukan adanya koordinasi. Karena apabila aspek koordinasi dilalaikan, maka akan terjadi berbagai hal yang tidak diinginkan seperti;

1. Para anggota akan saling bertengkar mengenai haknya, saling berebut hak, tetapi saling melemparkan tanggung jawab.
2. Adanya keputusan yang dibuat kurang sempurna, karena kurang bahan yang terhimpun lengkap dari berbagai unit kerja.

3. Timbulnya badan baru atau panitia-panitia yang sebetulnya tidak perlu, dan sebagainya.

C. Komunikasi dan Koordinasi

Dalam menunjang kelancaran arus bongkar muat barang di Pelabuhan Makassar, faktor komunikasi dan koordinasi sangat diperlukan di mana hal tersebut juga merupakan inti dari administrasi (aspek kerjasama).

Dalam setiap organisasi yang besar, di mana hubungan dan kegiatannya menjadi kompleks, maka setiap bagian harus bekerja secara terkoordinasi. Oleh karena itu koordinasi dan komunikasi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sering dikatakan bahwa koordinasi adalah hasil akhir dari pada komunikasi.

Menurut Soenarko (1997:79), komunikasi adalah:

Kegiatan atau proses penyampaian hasil pemikiran (keputusan, pendapat, keinginan, anjuran, dan lain sebagainya) dari seseorang kepada orang lain untuk dapat diterima sebagai suatu sikap diri orang lain.

Dengan demikian, setiap kegiatan tidak terlepas dari kegiatan komunikasi, demikian pula halnya dengan di Administrasi Pelabuhan Makassar yang sangat diperlukan terjadinya komunikasi secara optimal demi tercapainya segala tujuan yang diinginkan.

Sebagai tindak lanjut dari adanya komunikasi, dilakukan koordinasi. Menurut Handayani (1988:78) bahwa:

Koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda-beda, agar kegiatan dari pada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal, agar diperoleh hasil secara keseluruhan.

Dari pengertian di atas, maka koordinasi terhadap bagian-bagian pada setiap organisasi yang besar mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan koordinasi merupakan suatu usaha penyesuaian dari bagian-bagian yang berbeda-beda, agar masing-masing dapat memberikan hasil kerja yang optimal dalam rangka mencapai hasil dan tujuan secara keseluruhan yang maksimal pula.

Dengan demikian, koordinasi sebagai hasil akhir dari pada komunikasi, dimana dalam kegiatan koordinasi itu tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan komunikasi, maka sejumlah dari pada bagian/unit, di mana seseorang dapat mengkoordinasikan rentang atau jenjang pengendaliannya (span of control) sebagian besar ditentukan oleh kemampuannya berkomunikasi dengan orang-orang yang ada dalam unit-unit atau bagian-bagian tersebut.

Selanjutnya Mooney and Reily (Handyaningrat, 1988:89) mendefinisikan koordinasi sebagai berikut:

Coordination as the achievement of orderly group effort, and unity of action in the pursuit of common purpose.

(Koordinasi sebagai pencapaian usaha kelompok secara teratur dan kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama).

Lebih lanjut Mc. Farland (Handyaningrat, 1988:89)

mengemukakan:

Coordination is the process whereby an executive develops an orderly patterns of group efforts among his subordinates and secure unity of action in the pursuit of common purpose.

(Koordinasi adalah suatu proses dimana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama).

Dari definisi tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa koordinasi adalah:

1. Pencapaian usaha kelompok secara teratur.
2. Adanya kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan bersama.
3. Proses pencapaian usaha kelompok secara teratur dan adanya kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan bersama tersebut di atas, dikembangkan polanya oleh pimpinan.

Kebutuhan akan kegiatan koordinasi itu timbul apabila organisasinya bertambah besar, berkembang pesat dan kegiatan-kegiatannya bertambah kompleks. Kompleksitas kegiatan tidak boleh sampai menimbulkan kesemrawutan kegiatan. Semuanya itu harus dapat diarahkan ke satu tujuan tertentu yakni tujuan organisasi sebagai keseluruhan. Disinilah koordinasi memegang peranan yang penting.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab akan kebutuhan koordinasi, antara lain; adanya pembagian tugas

dalam organisasi, adanya penjenjangan dalam organisasi, adanya penggolongan unit-unit secara fungsional, adanya fungsi lini dan staf, adanya alokasi sumber dana dan daya yang terbatas, adanya kepribadian individu yang berbeda-beda, dan sebagainya.

D. Bongkar Muat Barang

Dalam rangka memperlancar proses penyelenggaraan aktivitas di pelabuhan baik mengenai pengkoordinasian kedatangan barang atau orang-orang yang datang dari luar, maupun barang atau orang-orang yang akan ke luar dari suatu daerah, maka sangat diperlukan embarkasi atau debarkasi baik sebagai tempat penurunan barang atau muatan penumpang dari kapal, maupun tempat keberangkatan atau pemberangkatan kapal baik darat maupun laut.

Bongkar muat pada pelabuhan Makassar dilakukan oleh para buruh dibawah koordinasi Administrator Pelabuhan, yang secara khusus lagi berada di bawah pengawasan bidang lalu lintas angkutan laut. Buruh bongkar muat Pelabuhan Makassar atau dikenal dengan sebutan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) ditampung dalam suatu wadah yang berbentuk koperasi, yakni Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (KTKBM). Koperasi tersebut berada dalam garis koordinasi Adminisrator Pelabuhan yang sekaligus menjadi binaannya.

Tenaga kerja bongkar muat menangani usaha bongkar muat dari dan ke kapal. Dengan demikian, dalam kegiatan bongkar muat, tenaga kerja yang ada cukup terkoordinir sebagai upaya meningkatkan pelayanan erus bongkar muat barang di Pelabuhan Makassar.



BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Pelabuhan Makassar

Sejarah perkembangan pelabuhan Makassar terbagi ke dalam 3 tahap, yaitu tahap kapal layar (perahu), tahap/zaman kapal api sampai pada periode proklamasi kemerdekaan, dan tahap/zaman kapal periode proklamasi kemerdekaan sampai sekarang.

1. Tahap/zaman kapal layar (perahu)

Pelabuhan Makassar sejak lama sudah mempunyai nama dalam perdagangan internasional. Negeri-negeri barat yang mencari rempah-rempah ke negeri timur pada akhirnya memusatkan perhatiannya ke pelabuhan Makassar. Kedudukannya yang sangat strategis menyebabkan mereka berlomba-lomba menguasai agar dapat memonopoli perdagangan di wilayah timur nusantara pada saat itu.

Pelabuhan Makassar terletak hampir pada pertengahan antara Batavia (Makassar) dan Maluku (kepulauan rempah-rempah) dan merupakan tempat yang ideal untuk berlabuh bagi segala jenis kapal karena terlindung dari ombak dan angin di samping itu tersedia pula makanan yang murah dan air minum yang berlimpah.

Pada saat itu pelabuhan Makassar berkembang menjadi pelabuhan transito yang terbesar dan terkaya di

Indonesia Bagian Timur. Kekayaan ini didapatkan dari pajak perdagangan rempah-rempah yang dipungut dari anak negeri serta kewajiban dari nakhoda kapal yang singgah dan masuk di pelabuhan Makassar.

Secara perlahan, pelabuhan Makassar telah mempunyai reputasi internasional, untuk merubah nama ini menjadi pelabuhan Ujung Pandang agaknya sulit untuk dilaksanakan. Karena kebiasaan internasional yang telah mengenal pelabuhan Makassar ini beratus-ratus tahun dikejutkan dengan perubahan nama. Konon istilah "pelabuhan Makassar" terdapat juga dalam buku Negara Kertagama yang ditulis Empu Prapanca dari Kerajaan Majapahit tahun 1294-1575, Makassar ini telah disebut-sebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka istilah pelabuhan Makassar akan tetap dipergunakan walaupun diakui dan menurut kenyataan bahwa pelabuhan ini secara geografis berada di kawasan Kotamadya Ujung Pandang.

2. Tahap/zaman kapal api sampai pada periode proklamasi kemerdekaan

Oleh karena kapal api ukurannya lebih besar sehingga memerlukan air yang dalam serta pelayanan dan servis yang istimewa, maka faktor yang menjadikan kota Makassar sebagai pusat pelayanan bagian Indonesia timur, sehingga dapat menjadi pelabuhan samudera dan pelabuhan antar pulau. Hal ini berarti pelabuhan Makassar mempunyai fungsi sebagai pelabuhan pelabuhan industri dan transit.

Pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia suatu maskapai perusahaan pelayaran Belanda yang bernama K.P.M. (Koninklijke Paketvaart Maatschappij) mempunyai monopoli pelayanan, membuka trayek dengan pelabuhan Makassar.

3. Tahap/zaman kapal periode proklamasi kemerdekaan sampai sekarang

Setelah kita memasuki zaman kemerdekaan, pemerintah menambah jumlah pelabuhan samudra di kawasan timur Indonesia yaitu; pelabuhan Bitung dan pelabuhan Ambon. Akan tetapi, fungsi daripada pelabuhan Makassar tidak akan merubah sifatnya yaitu tetap berfungsi sebagai pelabuhan distribusi dan pelabuhan penampungan.

Pelabuhan Makassar saat ini dikenal dengan pangkalan Soekarno dan pangkalan perahu Hasanuddin dengan panjang masing-masing dermaga 1360 meter dan 336 meter.

Sejalan dengan perkembangan pelabuhan, akhirnya menjadi pelabuhan transito di kawasan timur Indonesia dan dengan pertimbangan kurang mampu lagi menampung tuntutan operasional yang dari tahun ke tahun terus meningkat, maka dibangun dermaga tahun 1959 sepanjang 550 meter yang dikenal dengan pangkalan Hatta. Di mana seiring dengan pembangunan di pelabuhan tersebut, maka kunjungan kapal juga mengalami peningkatan walaupun berfluktuasi. Lebih jelasnya mengenai kunjungan kapal menurut jenis pelayaran dari tahun 1993 sampai 1997 dapat dilihat sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan	C a i l					D W T				
		1993	1994	1995	1996	1997	1993	1994	1995	1996	1997
1.	Samudra	213	280	268	128	178	1785199	2201558	1752674	1339153	1325120
2.	Nusantara dan lokal	1494	1634	1623	706	928	3790212	3940293	4134767	4464751	4216423
3.	Non Pelayaran (Khusus)	418	418	379	190	245	3029340	3267668	3502379	3988540	3846254
4.	Rakyat	1332	1375	1105	1200	1230	371541	399688	108242	118241	102543
	J u m l a h	3457	3707	3375	2224	2581	8976292	9809207	9498062	9910685	9490340

Sumber: Pelabuhan Makassar

B. Struktur Organisasi Pelabuhan Makassar

Organisasi merupakan tempat atau wahana untuk melaksanakan segala aktivitas-aktivitas administrasi. Oleh karena itu, organisasi sangat memegang peranan atau posisi kunci dalam mewujudkan suatu kegiatan.

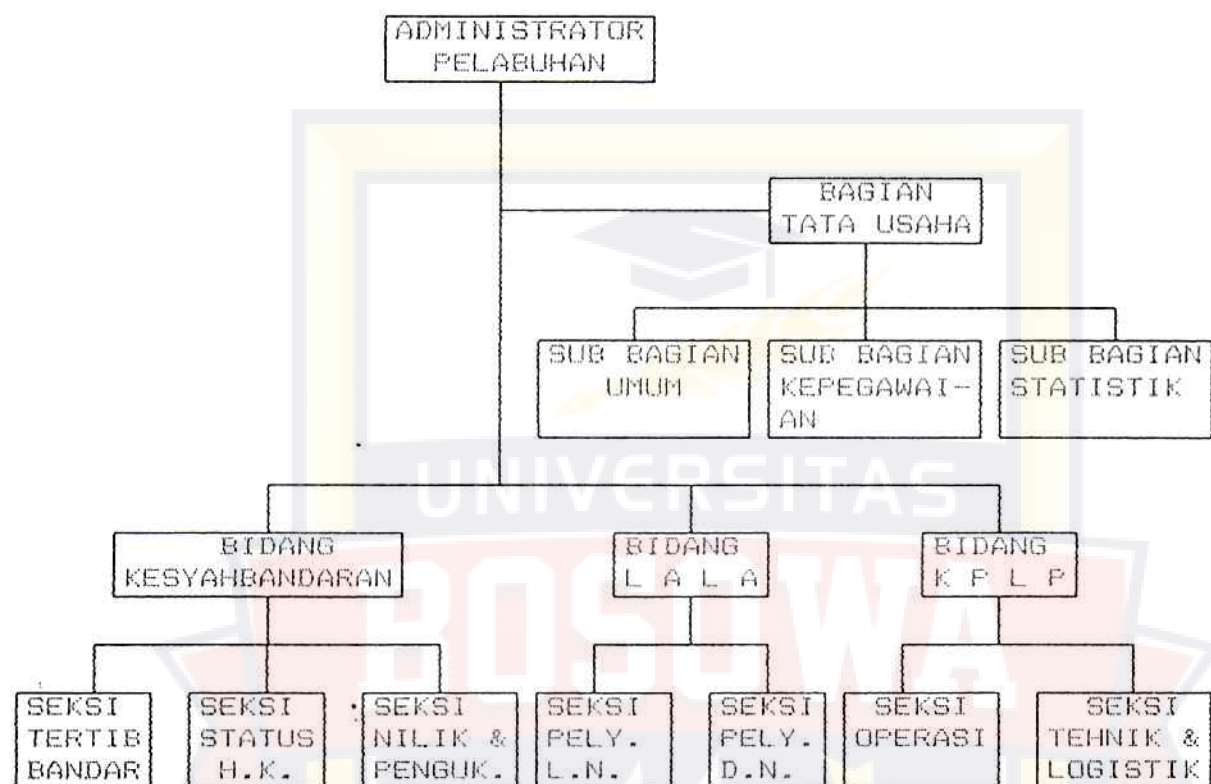
Organisasi merupakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, dapat dikatakan organisasi merupakan tempat kegiatan daripada orang-orang yang bekerja sama dalam usaha mencapai tujuan, seperti halnya organisasi Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut Administrator Pelabuhan Makassar.

Dengan demikian, Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut secara struktural berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Administrasi Pelabuhan Makassar.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. 89/OT.002/PHB-85 tanggal 11 April 1985, tentang Struktur organisasi dan Tata Kerja Kantor Administrator Pelabuhan yang berbentuk organisasi lini dan staf yang berdasarkan pembagian fungsi dan wewenang dalam menjalankan kegiatan kepelabuhan.

Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut membawahi dua seksi yaitu; Seksi Pelayanan Dalam Negeri dan Seksi Pelayanan Luar Negeri. Lebih jelasnya mengenai struktur organisasi Administrator Pelabuhan Makassar, dapat dilihat sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI ADFEL KLAS I MAKASSAR
SK. MENHUB KM. 89/DT.002/PHB-85



C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1) Kedudukan

1.a. Kantor Administrator Pelabuhan Makassar adalah berkedudukan sebagai unit organik di bidang kepelabuhanan, dimana pelabuhan yang diusahakan di lingkungan Departemen Perhubungan.

1.b. Kantor Administrator Pelabuhan yang berkedudukan pada Pelabuhan Kelas I berada dan bertanggung jawab kepada Menteri perhubungan.

2) Tugas

Kantor Administrator Pelabuhan Makassar mempunyai tugas mengendalikan tugas pelayanan di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan untuk memperlancar angkutan laut.

3) Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, maka Kantor Administrator Pelabuhan mempunyai tugas :

3.a. Menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan pelabuhan bersama-sama dengan instansi pemerintah lainnya.

3.b. Melaksanakan pemilikan kebandaran, keselamatan kapal, pengukuran dan pendaftaran kegiatan jasa Maritim kapal serta pendaftaran.

3.c. Melaksanakan pengamanan dan penertiban di daerah lingkungan kerja pelabuhan bandar per-

airan laut dan pantai serta memberikan bantuan SAR;

3.d. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Kantor Administrator Pelabuhan.

D. Keadaan Pegawai

Bidang Lalu Lintas Angkutan mempunyai tugas pengendalian tugas pelayanan di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan untuk memperlancar arus bongkar muat barang di pelabuhan Makassar.

Untuk memperoleh gambaran tentang keadaan pegawai pada Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Keadaan Pegawai Pada Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut Pelabuhan Makassar Berdasarkan Golongan dan Bidang Tugas, Keadaan Tahun 1998

No.	Golongan	Jumlah Pegawai
1.	I	2
2.	II	14
3.	III	11
4.	IV	1
Jumlah		28

Sumber: Kantor Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut Pelabuhan Makassar, Tahun 1998

Berdasarkan data di atas, maka diperoleh suatu gambaran bahwa pegawai yang ada pada Kantor Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut Pelabuhan Makassar sebanyak 28 orang

yang terbagi atas; golongan I sebanyak 2 orang, golongan II sebanyak 14 orang, golongan III sebanyak 11 orang, dan golongan IV sebanyak 1 orang.

Dengan melihat keadaan pegawai tersebut, maka terlihat bahwa pegawai yang paling banyak masih berada pada golongan II, kemudian disusul golongan III, kemudian golongan I dan terakhir golongan IV. Dengan demikian, rata-rata tingkat pendidikan pegawai masih rendah. Hal tersebut didukung oleh data tentang tingkat pendidikan pegawai sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Kantor Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut Pelabuhan Makassar, Keadaan Tahun 1998

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang
1.	Sarjana (S1)	7
2.	Sarjana Muda (D.3)	5
3.	S L T A	14
4.	S L T P	2
5.	S D	0
J u m l a h		28

Sumber: Kantor Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut Pelabuhan Makassar, Tahun 1998

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa tingkat pendidikan pegawai pada Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut rata-rata masih rendah, hal itu terbukti dari 28 pegawai, terdapat 2 orang tingkat pendidikan SLTP, dan 14 orang SLTA.

Dengan melihat tingkat pendidikan pegawai Kantor Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut, maka diharapkan pihak yang berwenang untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang diharapkan mampu mengembangkan profesionalisme pegawai atau pengembangan sumber daya manusianya, sehingga perkembangan yang sangat pesat di berbagai bidang dapat diikuti oleh pengembangan kemampuan personil atau pegawai.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Makassar

Administrasi bongkar muat di pelabuhan Makassar merupakan hal yang sangat esensial demi terselenggaranya arus bongkar muat barang secara efisien dan efektif. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan bongkar muat barang sangat diperlukan adanya perencanaan yang dilandasi oleh kerjasama sebagai refleksi dari adanya komunikasi dan koordinasi dari berbagai unit kerja khususnya pada Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut yang membawahi Seksi Pelayanan Dalam Negeri dan Seksi Pelayanan Luar Negeri. Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas diperlukan adanya pengawasan secara efektif, agar pelaksanaan tugas dalam kaitannya dengan bongkar muat di pelabuhan Makassar dapat berlangsung secara efisiensi dan efektif. Pengawasan yang dimaksud sifatnya bukan mencari kesalahan bawahan akan tetapi memberikan solusi terhadap kesalahan atau keterbatasan yang dimiliki oleh para pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Untuk memperoleh gambaran mengenai administrasi bongkar muat barang di pelabuhan Makassar yang ditinjau dari aspek kerjasama pelaksanaan bongkar muat dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas pegawai pada Bidang Lalu Lintas dalam kaitannya dengan bongkar muat di

pelabuhan Makassar, dapat dilihat dari pernyataan responden berikut.

TABEL 4. KEADAAN KOMUNIKASI ANTAR PEGAWAI DALAM PELAKSANAAN TUGAS

Alternatif	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
a	Sangat harmonis	13	46,43
b	Cukup harmonis	15	53,57
c	Kurang harmonis	0	0
d	Tidak harmonis	0	0
Jumlah		28	100,00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Nopember 1998, Nomor 1.

Berdasarkan tabel 3 di atas, nampak bahwa menyatakan hubungan komunikasi antar pegawai berlangsung secara sangat harmonis sebanyak 13 responden (46,43%), cukup harmonis sebanyak 15 responden (53,57%), dan tidak ditemui adanya responden yang menyatakan kurang harmonis dan tidak harmonis.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan komunikasi sebagai landasan dalam mengadakan kerjasama di Kantor Administrator Pelabuhan khususnya pada Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut berlangsung dengan cukup harmonis. Hal tersebut menurut asumsi penulis sangat mendukung administrasi pelaksanaan bongkar muat barang di pelabuhan Makassar, karena dengan adanya komunikasi yang cukup harmonis tersebut, akan memudahkan mengadakan kerjasama

atau koordinasi dengan pimpinan, para buruh tenaga kerja bongkar muat, dan berbagai pihak terkait dalam pelaksanaan bongkar muat barang.

TABEL 5. KEADAAN KOORDINASI SECARA VERTIKAL DALAM PELAKSANAAN TUGAS

Alternatif	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
a	Sangat baik	8	28,57
b	Cukup baik	20	71,43
c	Kurang baik	0	0
d	Tidak baik	0	0
Jumlah		28	100,00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Nopember 1998, Nomor 2.

Berdasarkan tabel 4 di atas, nampak bahwa yang menyatakan keadaan koordinasi secara vertikal atau dengan pimpinan berlangsung dengan sangat sebanyak 8 responden (28,57%), cukup baik sebanyak 20 responden (71,43%), dan tidak ditemui adanya responden yang menyatakan kurang baik dan tidak baik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keadaan koordinasi antara pegawai dengan pimpinan maupun antar pegawai dalam lingkup Lalu Lintas Angkutan Laut dengan para tenaga kerja bongkar muat (TKBM) berlangsung cukup baik. Selanjutnya mengenai koordinasi antara pegawai yang ditinjau secara horizontal, dapat dilihat pada pernyataan responden berikut.

TABEL 6. KEADAAN KOORDINASI SECARA HORIZONTAL
DALAM PELAKSANAAN TUGAS

Alternatif	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
a	Sangat baik	11	39,29
b	Cukup baik	17	60,71
c	Kurang baik	0	0
d	Tidak baik	0	0
Jumlah		28	100,00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Nopember 1998, Nomor 3.

Berdasarkan tabel 5 di atas, nampak bahwa yang menyatakan hubungan atau koordinasi secara horizontal antar sesama pegawai berlangsung dengan sangat baik sebanyak 11 responden (39,29%), cukup baik sebanyak 17 responden (60,71%), dan tidak ditemui responden yang menyatakan kurang baik dan tidak baik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang berlangsung secara horizontal berlangsung dengan cukup baik, seperti halnya pelaksanaan koordinasi secara vertikal. Hal tersebut merupakan suatu isyarat bahwa kegiatan kerjasama antar pegawai baik secara vertikal maupun secara horizontal dalam menunjang aktivitas bongkar muat barang di pelabuhan Makassar selama ini terjalin dengan cukup baik. Keadaan tersebut menurut asumsi penulis patut dipelihara demi pemberian pelayanan yang maksimal kepada masyarakat pengguna jasa pelabuhan Makassar. Namun demikian, koordinasi tersebut harus pula

ditunjang oleh kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Dan mengenai hal tersebut dapat dilihat pada pernyataan responden berikut.

TABEL 7. KEMAMPUAN PEGAWAI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS

Alternatif	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
a	Mampu	9	32,14
b	Cukup mampu	19	67,86
c	Kurang mampu	0	0
d	Tidak mampu	0	0
Jumlah		28	100,00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Nopember 1998, Nomor 4.

Berdasarkan tabel 6 di atas, nampak bahwa yang menyatakan pegawai sangat mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembankan kepadanya sebanyak 9 responden (32,14%), cukup mampu sebanyak 19 responden (67,86%), dan tidak ditemui adanya responden yang menyatakan kurang mampu dan tidak mampu.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa para pegawai dalam lingkup Lalu Lintas Angkutan Laut sudah cukup memiliki kemampuan atau profesionalisme dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Hal itu merupakan salah satu bukti administrasi bongkar muat atau terjalannya kerjasama yang baik antar pegawai yang didukung oleh adanya kemampuan para pegawai dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya.

TABEL 8. PERENCANAAN KERJA SETIAP MEMULAI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB YANG DIBERIKAN

Alternatif	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
a	Selalu	28	100,00
b	Kadang-kadang	0	0
c	Jarang	0	0
d	Tidak pernah	0	0
Jumlah		28	100,00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Nopember 1998, Nomor 5.

Berdasarkan tabel 7 di atas, nampak bahwa semua responden penelitian ini menyatakan selalu membuat perencanaan kerja (100,00%). Hal itu berarti, bahwa sebelum para pegawai melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya selalu didahului dengan perencanaan yang matang untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan tugas.

Penyusunan rencana kerja sebelum melakukan suatu kerja atau aktivitas kantor atau aktivitas lainnya mutlak dilakukan agar diperoleh suatu gambaran mengenai hasil kerja yang diharapkan, fenomena-fenomena yang mungkin muncul sehubungan dengan aktivitas yang dilakukan dan bagaimana mengantisipasinya. Selanjutnya mengenai pelaksanaan tugas berdasarkan rencana kerja yang telah dibuat, dapat dilihat pada pernyataan responden berikut.

TABEL 9. PELAKSANAAN TUGAS PEGAWAI BERDASARKAN PERENCANAAN KERJA YANG TELAH DIBUAT

Alternatif	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
a	Selalu	27	96,43
b	Kadang-kadang	1	3,57
c	Jarang	0	0
d	Tidak pernah	0	0
Jumlah		28	100,00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Nopember 1998, Nomor 6.

Berdasarkan tabel 8 di atas, nampak bahwa yang menyatakan pelaksanaan tugas selalu berdasarkan rencana kerja yang telah dibuat sebanyak 27 responden (96,43%), kadang-kadang sebanyak 1 responden (3,57%), dan tidak ditemui adanya responden yang menyatakan jarang dan tidak pernah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa umumnya pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan atau dibebankan kepadanya selalu berdasarkan rencana kerja yang telah dibuat. Hal itu ditempuh untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan tugas. Namun demikian perlu ditegaskan bahwa rencana kerja yang telah dibuat tersebut bukan bersifat statis, tetapi bersifat dinamis. Hal itu dilakukan untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi demi kelancaran pelaksanaan tugas yang diberikan. Dengan demikian, wajar kalau terdapat satu responden yang menyatakan kadang-kadang.

Artinya bahwa mereka kadang mengikuti rencana kerja kadang pula tidak. Hal itu berdasarkan pada situasi dan kondisi yang terjadi yang dapat mendukung kelancaran tugas yang diberikan.

B. Pengawasan Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut dan Bongkat Muat Barang

Kegiatan pengawasan terhadap berbagai aktivitas pegawai dilakukan pada setiap organisasi, baik organisasi pemerintahan maupun swasta. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya penyelewengan, kesalahan dan sebagainya. Oleh karena itu, setiap pegawai harus merespon secara positif pelaksanaan pengawasan tersebut.

Berikut diulas mengenai pengawasan dalam meningkatkan kualitas kerja para pegawai sehubungan dengan administrasi bongkar muat barang di pelabuhan Makassar. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

TABEL 10. PENERAPAN SISTEM PENGAWASAN DALAM PELAKSANAAN AKTIVITAS SEHARI-HARI

Alternatif	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
a	Sangat diterapkan	22	78,57
b	Cukup diterapkan	6	21,43
c	Kurang diterapkan	0	0
d	Tidak diterapkan	0	0
Jumlah		28	100,00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Nopember 1998, Nomor 7.

Berdasarkan tabel 9 di atas, nampak bahwa yang menyatakan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sangat diterapkan sistem pengawasan sebanyak 22 responden (78,57%), cukup diterapkan sebanyak 6 responden (21,43%), dan tidak ditemui adanya responden yang menyatakan kurang diterapkan dan tidak diterapkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa demi kelancaran tugas para pegawai dalam lingkup Lalu Lintas Angkutan Laut di pelabuhan Makassar, maka selalu ini sangat diterapkan sistem pengawasan. Adapun sistem pengawasan yang diterapkan tersebut adalah sistem pengawasan melekat, yang mencerminkan adanya penekanan akan kesadaran melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan serta pemberian pengawasan berdasarkan struktur jabatan yang ada.

TABEL 11. PEMBERIAN ARAHAN DARI PIMPINAN SETIAP SAAT DEMI KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS

Alternatif	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
a	Selalu	24	85,71
b	Kadang-kadang	4	14,29
c	Jarang	0	0
d	Tidak pernah	0	0
Jumlah		28	100,00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Nopember 1998, Nomor 8.

Berdasarkan tabel di atas, nampak bahwa yang menyatakan selalu diberikan pengarahan setiap saat demi kelancaran pelaksanaan tugas sebanyak 24 responden (85,71%), kadang-kadang sebanyak 4 responden (14,29%), dan tidak ditemui adanya responden yang menyatakan jarang dan tidak pernah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pimpinan setiap unit kerja cenderung memberikan pengarahan demi kelancaran tugas yang dibebankan kepadanya. Pemberian pengarahan tersebut dilakukan baik pada setiap upacara, kegiatan rapat, pertemuan informal dan sebagainya. Hal itu menurut asumsi penulis sifatnya sangat positif demi terjalannya komunikasi secara harmonis antar pegawai, atau antar pimpinan dengan bawahan, sehingga akan memberikan inspirasi akan kesadaran pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya lebih tinggi.

TABEL 12. TANGGAPAN RESPONDEN SEHUBUNGAN DENGAN PENGAWASAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS

Alternatif	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
a	Sangat positif	13	46,43
b	Cukup positif	15	53,57
c	Kurang positif	0	0
d	Tidak positif	0	0
Jumlah		28	100,00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Nopember 1998, Nomor 9.

Berdasarkan tabel 11 di atas, nampak bahwa yang menyatakan pengawasan berlangsung saat ini ditanggapi secara sangat positif sebanyak 13 responden (46,43%), cukup positif sebanyak 15 responden (53,57%), dan tidak ditemui adanya responden yang menyatakan kurang positif dan tidak positif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang diterapkan oleh pimpinan secara vertikal secara umum ditanggapi oleh para pegawai secara positif. Hal itu berarti para pegawai merasa bahwa sistem pengawasan yang diterapkan tidak menghambat pelaksanaan tugasnya. Karena menurut asumsi penulis, seseorang yang merasa diawasi dalam pelaksanaan tugasnya, cenderung merasa kaku atau kurang konsentrasi, sehingga menganggap bahwa pengawasan yang berlangsung hanya menghambat kelancaran pelaksanaan tugasnya. Namun tidak demikian halnya dengan pegawai dalam lingkup Lalu Lintas Angkutan Laut, di mana mereka menanggapi secara positif pengawasan yang diberikan, sehingga dapat memperlancar kerjasama dalam pelaksanaan administrasi bongkar muat barang di pelabuhan Makassar pada khususnya, dan pemberian pelayanan kepada masyarakat pada umumnya.

TABEL 13. TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG KONTINUITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN

Alternatif	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
a	Ya	28	100,00
b	Tidak	0	0
Jumlah		28	100,00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Nopember 1998, Nomor 10.

Berdasarkan tabel 12 di atas, nampak bahwa semua responden (100,00%) penelitian ini menyatakan ya atau menganggap perlunya pengawasan secara kontinyu dilaksanakan. Hal itu dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan, penyelewengan dalam pelaksanaan tugas para pegawai sebagai bagian untuk memperlancar bongkar muat barang di pelabuhan Makassar.

Menurut asumsi penulis, pelaksanaan pengawasan di setiap unit kerja memang harus dilaksanakan secara kontinyu dan obyektif, agar para pegawai memiliki persepsi yang positif terdapat pengawasan yang diberikan, sehingga memandang pengawasan yang berlangsung bukan untuk mencari kesalahan, akan tetapi lebih menekankan kepada mencegah terjadinya kesalahan atau penyelewengan (preventif). Selanjutnya tanggapan responden mengenai keharusan responden memberikan laporan tentang setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan, dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 14. PERNYATAAN RESPONDEN TENTANG KEHARUSAN MEMBERIKAN LAPORAN TENTANG SETIAP TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB YANG DIBEBAKANKAN

Alternatif	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
a	Ya	28	100,00
b	Tidak	0	0
Jumlah		28	100,00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Nopember 1998, Nomor 11.

Berdasarkan tabel di atas, nampak bahwa semua responden penelitian ini (100,00%) menyatakan ya, atau setiap pegawai harus memberikan laporan kepada pimpinan sehubungan dengan hasil kerjanya. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari pengawasan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan tugas pada khususnya, dan agar administrasi bongkar muat barang di pelabuhan Makassar dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

Pemberian laporan oleh bawahan kepada pimpinan dalam suatu organisasi mutlak dilakukan agar segala aktivitas pegawai tetap terkontrol dengan baik, sekaligus untuk mengecek sampai sejauhmana tugas-tugas yang diberikan dapat terlaksana. Dan hal tersebut juga merupakan kewajiban bawahan untuk memberikan laporan yang sebaik-baiknya, dan bukan hanya sekedar menyenangkan hati pimpinan. Selanjutnya, laporan yang diberikan tersebut akan diperiksa oleh pimpinan, sebagaimana dinyatakan oleh responden berikut.

TABEL 15. PEMERIKSAAN ATAS SEGALA TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB YANG DIBERIKAN

Alternatif	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
a	Selalu	28	100,00
b	Kadang-kadang	0	0
c	Jarang	0	0
d	Tidak pernah	0	0
Jumlah		28	100,00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Nopember 1998, Nomor 12.

Berdasarkan tabel 14 di atas, nampak bahwa semua responden penelitian ini (100,00%) menyatakan laporan atas tugas dan tanggung jawab yang diberikan selalu diperiksa oleh pimpinan. Dengan demikian, demi baiknya pelaksanaan administrasi bongkar muat barang di pelabuhan Makassar, maka segala tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada para pegawai selalu diperiksa oleh atasan langsungnya.

Pemeriksaan atas laporan oleh pimpinan tersebut menurut asumsi penulis merupakan suatu keharusan, agar pegawai dalam melaksanakan tugas lebih hati-hati dan bertindak secara profesional. Karena mereka merasa bahwa tugas yang dikerjakan akan diteliti oleh pimpinannya, sehingga lebih meningkatkan kinerjanya yang mengarah kepada peningkatan produktivitas kerjanya.

TABEL 16. TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG OBYEKTIVITAS PENGAWASAN OLEH PIMPINAN

Alternatif	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
a	Obyektif	9	32,14
b	Cukup obyektif	19	67,86
c	Kurang obyektif	0	0
d	Tidak obyektif	0	0
J u m l a h		28	100,00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Nopember 1998, Nomor 13.

Berdasarkan tabel 15 di atas, nampak bahwa yang menyatakan pelaksanaan pengawasan yang diterapkan di dalam lingkungan Administrasi Pelabuhan pada umumnya dan khususnya di Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut dilaksanakan secara obyektif sebanyak 9 responden (32,14%), cukup obyektif sebanyak 19 responden (67,86%), dan tidak ditemui adanya responden yang menyatakan kurang obyektif dan tidak obyektif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan dipandang oleh pegawai sudah dilaksanakan secara obyektif. Hal itu berarti para pegawai merasa bahwa tindakan pengawasan atau tindakan disiplin yang diterapkan sebagai manifestasi dari adanya pengawasan yang dilakukan apabila terjadi penyelewengan dilaksanakan secara obyektif atau tidak memandang bahwa pegawai yang bersangkutan dekat dengan pimpinan dan sebagainya. tetapi

hal itu dilakukan berdasarkan tingkat kesalahan atau pelanggaran pegawai yang bersangkutan.

TABEL 17. TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI DAMPAK PENGAWASAN DALAM MENGANTSIPASI KESALAHAN ATAU PENYELEWENGAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS

Alternatif	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
a	Sangat positif	8	28,57
b	Cukup positif	20	71,43
c	Kurang positif	0	0
d	Tidak positif	0	0
Jumlah		28	100,00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Nopember 1998, Nomor 14.

Berdasarkan tabel 16 di atas, nampak bahwa yang menyatakan pengawasan yang dilakukan memberikan dampak yang sangat positif dalam mengantisipasi kesalahan atau penyelewengan dalam pelaksanaan tugas sebanyak 8 responden (28,57%), cukup positif sebanyak 20 responden (71,43%), dan tidak ditemui adanya responden yang menyatakan kurang positif dan tidak positif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan selama ini memiliki dampak positif terhadap kelancaran pelaksanaan tugas para pegawai, sehingga para pegawai menanggapi secara cukup positif pengawasan yang dilaksanakan. Sedangkan tanggapan responden mengenai sanksi atau hukuman bagi pegawai yang

melakukan pelanggaran dapat dilihat pada pernyataan responden berikut.

TABEL 18. TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI ADANYA SANKSI/HUKUMAN BAGI PEGAWAI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN

Alternatif	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
a	Selalu	21	75,00
b	Kadang-kadang	7	25,00
c	Jarang	0	0
d	Tidak pernah	0	0
Jumlah		28	100,00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Nopember 1998, Nomor 15.

Berdasarkan tabel di atas, nampak bahwa yang menyatakan selalu ada sanksi atau hukuman bagi para pegawai yang melakukan pelanggaran atau penyelewengan sebanyak 21 responden (75,00%), kadang-kadang sebanyak 7 responden (25,00%), dan tidak ditemui adanya responden yang menyatakan jarang dan tidak pernah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama ini sehubungan dengan penerapan pengawasan dalam aktivitas sehari-hari para pegawai, untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan atau penyelewengan yang terjadi selalu ada sanksi yang diberikan kepada para secara obyektif. Hal itu menurut asumsi penulis sangat esensial guna memperlancar administrasi pelaksanaan bongkar muat barang di pelabuhan Makassar, melalui pendisiplinan kerja para

pegawai yang menanggapi masalah bongkar muat barang di pelabuhan Makassar tersebut.

TABEL 19. PENEKANAN OLEH PIMPINAN UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN PENUH RASA TANGGUNG JAWAB

Alternatif	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
a	Selalu	24	85,71
b	Kadang-kadang	4	14,29
c	Jarang	0	0
d	Tidak pernah	0	0
Jumlah		30	100,00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Nopember 1998, Nomor 16.

Berdasarkan tabel 18 di atas, nampak bahwa yang menyatakan pimpinan selalu menekankan kepada para pegawai untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab sebanyak 24 responden (85,71%), kadang-kadang sebanyak 4 responden (14,29%), dan tidak ditemui adanya responden yang menyatakan jarang dan tidak pernah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa demi efektifnya administrasi bongkar muat barang di pelabuhan Makassar, maka pimpinan selalu memberikan penekanan kepada para pegawai agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan disertai dengan kesadaran yang tinggi. Hal itu dilakukan agar tugas yang diberikan kepada para pegawai memberikan dampak secara maksimal demi kelancaran pelaksanaan bongkar muat barang di pe-

labuhan Makassar yang melibatkan semua unsur dalam lingkup Administrator Pelabuhan Pelabuhan Makassar, khususnya Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut dan para Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM).

Dari hasil pernyataan responden dan ulasan di atas, maka diperoleh suatu kesimpulan umum bahwa dalam menunjang kelancaran bongkar muat barang di pelabuhan Makassar, kegiatan kerjasama para pegawai berlangsung dengan baik, hal itu ditunjang oleh komunikasi yang harmonis serta koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal antara pegawai dalam lingkup Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut pelabuhan Makassar. Selain hal di atas, faktor pengawasan sebagai salah satu faktor yang sangat menentukan kelancaran bongkar muat barang di pelabuhan Makassar selama ini diterapkan dengan baik, dan mendapat respon secara positif dari para pegawai, sehingga para pegawai dapat melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi.

Dengan demikian administrasi bongkar muat barang di pelabuhan Makassar yang ditinjau dari dua aspek yaitu aspek kerjasama dalam pelaksanaan bongkar muat barang, dan aspek pengawasan dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas sudah berlangsung dengan efektif dan efisien. Hal tersebut sebagai salah satu akan keberhasilan sistem

administrasi yang diterapkan sebagai usaha kerjasama para pegawai guna mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu adanya sistem pelayanan bongkar muat barang secara berdayaguna dan berhasilguna.



BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai administrasi bongkar muat barang di pelabuhan Makassar, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Administrasi bongkar muat barang di pelabuhan Makassar sudah berlangsung dengan baik, ditinjau dari aspek kerjasama yang ditunjang oleh komunikasi secara harmonis, koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkup Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut pelabuhan Makassar. Begitu pula aspek pengawasan sudah diterapkan dengan baik serta mendapat respon secara positif dari para pegawai, sehingga para pegawai dapat melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi.
2. Faktor pendukung administrasi bongkar muat barang di pelabuhan Makassar, yaitu; rasa tanggung jawab pegawai untuk melaksanakan tugas berkat adanya pendelegasian tugas secara jelas, faktor kerjasama yang dilandasi oleh komunikasi yang harmonis serta koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga memperlancar pelaksanaan tugas para pegawai, dan adanya perhatian yang cukup besar dari atasan dengan mengadakan pengawasan setiap saat sehingga pelaksanaan

tugas para pegawai khususnya yang bersifat administratif guna memperlancar bongkar muat barang di pelabuhan Makassar semakin efektif dan efisien.

3. Kendala dan upaya pemecahannya dalam administrasi bongkar muat barang di pelabuhan Makassar meliputi; keterbatasan Faktor kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki baik ditinjau dari segi kualitas maupun kuantitas yang disebabkan oleh latar belakang pendidikan pegawai, serta aspek ketidakterbukaan pegawai terhadap berbagai permasalahan yang dialami. Adapun upaya yang dilakukan adalah memberikan kesempatan kepada para pegawai untuk mengikuti pendidikan formal serta pendidikan pelatihan. Di samping itu, berupaya meningkatkan komunikasi secara harmonis antar pegawai, sehingga terjalin kerjasama atau koordinasi dengan penuh rasa kekeluargaan.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Kepala Bidang lalu Lintas Angkutan Laut untuk meningkatkan kerjasama melalui komunikasi dan koordinasi secara harmonis, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan administrasi bongkar muat barang di pelabuhan Makassar, begitu pula hendaknya mengupayakan pengadaan dan pemeliharaan fasilitas bongkar muat secara maksimal demi lindakan efisiensi.

2. Diharapkan kepada para pegawai untuk meningkatkan kesadarannya melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan guna memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Handayaniingrat, Soewarno. 1988. *Pengantar studi administrasi dan manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Handoko, T. Hani. 1992. *Manajemen personalia dan sumber daya manusia*. BPFE. Yogyakarta.
- Julitriarsa, Djati., Suprihanto, John. 1988. *Manajemen Umum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- M. Manullang. 1992. *Dasar-dasar manajemen*. Medan: Ghalia Indonesia.
- Siagian, S.P.. 1979. *Filsafat administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- _____. 1985. *Administrasi pembangunan, konsep, dimensi dan strateginya*. Jakarta: Gunung Agung.
- Soenarko. 1997. *Public relations, pengertian, fungsi dan peranannya*. Surabaya: CV. Papyrus.
- Sutarto. 1981. *Ilmu administrasi*. Yogyakarta.
- Syamsi, Ibnu. 1983. *Pokok-pokok administrasi dan manajemen*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- The Liang Gie. 1978. *Administrasi perkantoran modern*. Jilid I. Jakarta: Nurcahaya.
- Waldo, Dwiht. (terjemahan). 1979. *Pengantar study public administration*. Jakarta: Bina Baru.

B. Buku-Buku Penelitian

- Singarimbun Masri dan Sogyon Effendi. 1989. *Metode penelitian survei*. LP3ES. Jakarta.
- Sudjana, Nana. 1989. *Tuntunan penyusunan karya ilmiah*. Sinar Baru. Bandung
- Sugiyono. 1993. *Metode penelitian administrasi*. Alfabeta. Bandung.

C. Dokumen dan Lain-lain

Depdikbud. 1993. *UUD 1945, P-4, GBHN, Tap-Tap MPR 1993, bahasa penataran dan bahan referensi penataran*. Dirjen Dikti. Jakarta.



ANGKET PENELITIAN

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Keberadaan angket ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang administrasi bongkar muat barang di Pelabuhan Makassar, dalam rangka penyelesaian studi penulis pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas "45" Ujungpandang.

Sehubungan hal tersebut, sudilah kiranya Bapak/Ibu mengisi angket ini berdasarkan keadaan yang sebenarnya, sehingga informasi yang diperoleh dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi secara obyektif dan dapat menjadi masukan dalam upaya perbaikan-perbaikan lebih lanjut.

Atas kesediaan Bapak/Ibu mengisi angket ini, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Wassalam.

Ujungpandang, September 1998

Peneliti,

Muh. Yusuf Dg. Sikki Z.

I. Identitas:

1. N a m a :
2. Jabatan :
3. A l a m a t :

II. Pertanyaan-Pernyataan:

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana keadaan komunikasi antara pegawai dalam melaksanakan tugas di lingkungan Administrator Pelabuhan khususnya di Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut?
 - a. sangat harmonis
 - b. cukup harmonis
 - c. kurang harmonis
 - d. tidak harmonis
2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana keadaan koordinasi secara vertikal atau pegawai dengan atasan demi kelancaran pelaksanaan tugas?
 - a. sangat baik
 - b. cukup baik
 - c. kurang baik
 - d. tidak baik
3. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana keadaan koordinasi secara horizontal atau antar pegawai dalam lingkup Lalu Lintas Angkutan Laut?
 - a. sangat baik
 - b. cukup baik
 - c. kurang baik
 - d. tidak baik
4. Bagaimana kemampuan Bapak/Ibu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan?
 - a. mampu
 - b. cukup mampu
 - c. kurang mampu
 - d. tidak mampu
5. Apakah dalam aktivitas sehari-hari, Bapak/Ibu selalu membuat rencana kerja?
 - a. selalu
 - b. kadang-kadang

- c. jarang
 - d. tidak pernah
6. Apakah dalam aktivitas sehari-hari, Bapak/Ibu melaksanakan tugas berdasarkan rencana kerja yang telah dibuat?
 - a. selalu
 - b. kadang-kadang
 - c. jarang
 - d. tidak pernah
 7. Apakah selama ini diterapkan sistem pengawasan dalam pelaksanaan aktivitas sehari-hari?
 - a. sangat diterapkan
 - b. cukup diterapkan
 - c. kurang diterapkan
 - d. tidak diterapkan
 8. Apakah Bapak/Ibu diberikan pengarahan dari pimpinan demi kelancaran pelaksanaan tugas?
 - a. selalu
 - b. jarang
 - c. kadang-kadang
 - d. tidak pernah
 9. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu sehubungan dengan sistem pengawasan yang diterapkan di lingkungan kerjanya?
 - a. sangat positif
 - b. cukup positif
 - c. kurang positif
 - d. tidak positif
 10. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang kontinuitas pelaksanaan pengawasan?
 - a. ya
 - b. tidak
 11. Apakah Bapak/Ibu diharuskan memberikan laporan atas setiap tugas dan tanggung jawab yang dibebankan?

- a. ya
b. tidak
12. Apakah pimpinan mengadakan pemeriksaan atas segala tugas dan tanggung jawab yang diberikan?
a. selalu
b. kadang-kadang
c. jarang
d. tidak pernah
13. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai obyektivitas pelaksanaan pengawasan yang diterapkan?
a. obyektif
b. cukup obyektif
c. kurang obyektif
d. tidak obyektif
14. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai dampak pengawasan dalam mengantisipasi kesalahan atau penyelewengan dalam pelaksanaan tugas?
a. sangat positif
b. cukup positif
c. kurang positif
d. tidak positif
15. Apakah selama ini diberikan sanksi atau hukuman bagi pegawai yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas?
a. selalu
b. kadang-kadang
c. jarang
d. tidak pernah
16. Menurut Bapak/Ibu, apakah pegawai diberikan penekanan oleh pimpinan untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab?
a. selalu
b. kadang-kadang
c. jarang
d. tidak pernah